



Penataan Birokrasi PR Wali Kota Baru

YOGYA, TRIBUN - Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih diharapkan bisa dilaksanakan pada bulan Mei ini. Kementerian dalam negeri (Kemendagri) pun diminta untuk bisa segera memproses pelantikan tersebut. Pasahnya, sejumlah persoalan birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk wali kota definitif.

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko

menjelaskan, saat ini ada sejumlah pekerjaan birokrasi yang hanya bisa ditangani oleh kepala daerah definitif. Di antaranya adalah pelantikan kepala dinas hingga promosi jabatan untuk pegawai negeri sipil.

"Penataan birokrasi menjadi salah satu PR yang harus segera diselesaikan. Karena, banyak organisasi perangkat daerah yang belum memiliki kepala dinas dan hanya

dijabat oleh pelaksana tugas," ujar Sujanarko se usai rapat praipurna (rapur) istimewa Pengumuman Kepala Daerah Terpilih di gedung DPRD setempat, pekan lalu.

Dia menyebut dengan masih dijabatnya pelaksana tugas (Pit) maka kewenangan dari organisasi perangkat daerah pun terbatas.

● ke halaman 14

Penataan Birokrasi PR Wali Kota Baru

● Sambungan Hal 13

Dia menjelaskan, proses pelantikan memang menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri.

Namun, pihak legislatif berharap pada bulan Mei ini, wali kota terpilih sudah dilantik. Dalam rapur istimewa tersebut diumumkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih dengan mengantongi 100.333 suara.

"Setelah rapur istimewa ini, kami akan menyampai-

kan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah DIY hari ini juga. Mudah-mudahan lancar hingga pelantikan bisa segera dilakukan," ujar Sujanarko.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengatakan, pihaknya berharap agar proses pelantikan bisa berjalan lancar. Dia menyebut, kewenangan KPU sudah berakhir pada saat penetapan kepala daerah terpilih.

"Kami juga tetap berharap agar masyarakat Yogyakarta menjadi masyarakat dan pemilih yang cerdas dengan tetap memberikan kritik membangun untuk kepala daerah terpilih. Salah satu-

nya dengan mengingatkan janji yang mereka sampaikan pada saat kampanye," ujar Wawan.

Secepatnya

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sulistiyono menjelaskan, waktu pelantikan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri bisa dilakukan secepatnya. Dia menyebut ada kemungkinan waktu pelantikan bisa saja disamakan dengan pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Kulonprogo.

"Untuk waktu pelantikan kami tidak tahu, itu tergantung Kemendagri. Mungkin nanti bisa sama dengan Kulonprogo," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005